



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

TIM REFORMASI BIROKRASI

DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, perlu membentuk Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Quick Wins;

4. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 758);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2020.
- PERTAMA : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala ini.
- KEDUA : Tim Reformasi Birokrasi mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala ini.
- KETIGA : Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
- KEEMPAT : Tim Reformasi Birokrasi melaksanakan tugas selama 10 (sepuluh) bulan, terhitung sejak bulan Februari s.d. November 2020.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun Anggaran 2020.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Kepala ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Utama Nomor 71 Tahun 2020 tentang Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 11 Februari 2020

KEPALA

BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,



YUDIAN WAHYUDI

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KEPALA
 BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
 NOMOR 5 TAHUN 2020
 TENTANG
 TIM REFORMASI BIROKRASI DI
 LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN
 IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2020

TIM REFORMASI BIROKRASI
 DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
 TAHUN 2020

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Jabatan
1.	Pengarah	Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.	Kepala BPIP
2.	Penanggung Jawab	Prof. Dr. Hariyono, M.Pd.	Wakil Kepala BPIP
3.	Ketua	Dr. Drs. Karjono, S.H., M.Hum.	Sekretaris Utama
4.	Wakil Ketua	Prof. FX.Adji Samekto, SH., M.Hum.	Plt. Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan
		Dr. Ani Purwanti, SH., M.Hum.	Plt. Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi
		Prof. FX. Adji Samekto, SH., M.Hum.	Deputi Bidang Pengkajian dan Materi
		Dr. Baby Siti Salamah, M.Psi. Psikolog.	Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan
		Dr. Rima Agristina, S.H., S.E., M.M.	Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi
5.	Sekretaris	Surahno, S.H., M.Hum.	Kepala Biro Hukum dan Organisasi
		Zainal Asriyanto, S.STP., M.Si.	Kepala Bagian Organsiasi dan Tata Laksana
		Fitriya Wulansari, S.E., M.Ak., CFrA.	Kepala Subbagian Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi
6.	Pokja Program Manajemen Perubahan		
	Koordinator	Tonny Agung Arifianto, S.E., M.A.B.	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan

	Anggota	Galuh Ibrahim, SE., M.M.	Kepala Subdirektorat Inovasi Pembudayaan
		July Budi Suharko, S.H.	Kepala Subdirektorat Analisis dan Sinkronisasi I
		Drs. Pankratius Bernardus Somi Balun, M.Sc.	Kepala Subdirektorat Kajian Filosofis dan Historis
		Dra. Endang Prihatin, M.Pd.	Kepala Subdirektorat Standardisasi dan Kurikulum Diklat II
		Agus Salim, S.E., M.Si.	Kepala Subdirektorat Evaluasi III
		Muhammad Waris Yuskan, S.E.	Kepala Bagian Perencanaan
		Fiter Argananda Siagian, S.E.	Analisis Kerjasama
7.	Pokja Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan		
	Koordinator	Surahno, S.H., M.Hum	Kepala Biro Hukum dan Organisasi
	Anggota	Muhani, SKM, MKM.	Kepala Subdirektorat Hubungan Antar Kementerian/Lembaga
		Yunita Imelda Tampubolon, S.H., M.H.	Kepala Subdirektorat Analisis dan Sinkronisasi III
		M. Akbar Hadiprabowo, S.H., M.H.	Direktur Standarisasi Materi dan Metode Aparatur Negara
		Muhammad Ichlasul Amal, S.T., M.M.	Kepala Subdirektorat Perencanaan dan Kerjasama Diklat III
		Edi Subowo, S.H., M.H.	Direktur Evaluasi
		Berthine S. Soediono, S.H., M.H.	Kepala Bagian Penyusunan Hukum
		Widya Castrena Budi Dharma, S.H.	Kepala Subbagian Produk Hukum Lainnya
8.	Pokja Program Penataan dan Penguatan Organisasi		
	Koordinator	Tri Purno Utomo, S.E., Ak., M.H.	Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia
	Anggota	Hotrun Siregar, S.Sos, M.Si.	Kepala Subdirektorat Sosialisasi
		Dodi Setiawan, S.H.	Kepala Subdirektorat Pelebagaan dan Rekomendasi II
		Dr. Muhammad Sabri, M.Ag.	Direktur Pengkajian dan Materi
		Rohman, S.St.Pi., M.E.	Subdirektorat Penyelenggaraan Diklat Aparatur Negara
		Leo Efriansa, S.STP, M.Si	Kepala Subdirektorat Pengendalian III
		Zainal Asriyanto, S.STP., M.Si.	Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana

		Luqman Nur Hakim, S.Kom., M.AP.	Kepala Subbagian Organisasi
9.	Pokja Program Penataan Tata Laksana		
	Koordinator	Surahno, S.H., M.Hum.	Kepala Biro Hukum dan Organisasi
	Anggota	Rimon A. M. Siregar, S.STP, M.M.	Kepala Subdirektorat Pemantapan Pranata
		Andy Apriyanto, S.H, M.Si.	Kepala Subdirektorat Preventif
		Drs. Pankratius Bernardus Somi Balun, M.Sc.	Kepala Subdirektorat Kajian Filosofis dan Historis
		Tri Budi Haryoko, Amd.IP., S.H., M.H.	Kepala Subdirektorat Perencanaan dan Kerja Sama Diklat I
		Achdyat, S.Kom., M.Si.	Kepala Subdirektorat Evaluasi II
		Yudha Prasetya Bhakti, S.H.	Kepala Subbagian Peraturan Perundang-Undangan
		Zainal Mubaroq Arief Wibisana, S.Kom.	Kepala Subbagian Dokumentasi Hukum
10.	Pokja Program Penataan Sistem Manajemen SDM		
	Koordinator	Tri Purno Utomo, S.E., Ak., M.H.	Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia
	Anggota	Rahmat Mustafa, S.STP., M.Si.	Kepala Subdirektorat Pengembangan Jaringan
		Sarwo Edy, A.Md.IP., S.H., M.Si.	Kepala Subdirektorat Pelembagaan dan Rekomendasi I
		M Akbar Hadiprabowo, S.H., M.H.	Direktur Standarisasi Materi dan Metode Aparatur Negara
		Hantoro Purnomo Aji, S.T., M.T.	Kepala Subdirektorat Penyelenggaraan Diklat Formal
		Yelvi Azwita, S.E., M.M.	Kepala Subdirektorat Pengendalian I
		Eko Boedijanto, S.T., M.T.	Kepala Bagian Sumber Daya Manusia
		Stefie Hendric Alexander Laimeheriwa, S.IP., M.Si.	Kepala Subbagian Pengelolaan Kinerja SDM
11.	Pokja Program Penguatan Pengawasan		
	Koordinator	Abbas, S.H., M.H.	Kepala Biro Pengawasan Internal
	Anggota	Thomas Suseno, S.Kom., M.Si.	Kepala Subdirektorat Kerjasama
Jackson Simamora, S.H., M.Si.		Kepala Subdirektorat Pelembagaan dan Rekomendasi III	

		Toto Purbiyanto, S.Kom, M.Ti.	Direktur Standardisasi Materi dan Metode Formal, Nonformal dan Informal
		Dr. Tri Suhartati, M.Pd.	Kepala Subdirektorat Standardisasi dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan I
		Mukhammad Fahrurrozi, S.Sos., M.Si.	Direktur Pengendalian
		Budi Susila, S.H., M.H., CFrA.	Kepala Bagian Pengawasan Kinerja
		Bambang Supriyadi, S.Sos., M.M.	Kepala Bagian Pengawasan Keuangan
12.	Pokja Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja		
	Koordinator	Sunoto Setyo, S.E., M.Si.	Kepala Biro Fasilitas Dewan Pengarah dan Ketenagaahlian
	Anggota	Herry Gunawan Daulay, SP., M.M.	Kepala Subdirektorat Hubungan Masyarakat dan Organisasi Sosial Politik
		Janri Alin Tompson, S.STP., M.Si.	Kepala Subdirektorat Apresiasi
		Puji Hartana, S.Sos.	Kepala Subdirektorat Kajian Keilmuan
		Devi Vijayanti Octavia, S.STP, M.PA.	Kepala Subdirektorat Perencanaan dan Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan II
		Riswan, S.STP., M.Si.	Kepala Subdirektorat Pengendalian II
		Kahfi Heriyanto, S.Sos, M.P.	Kepala Bagian Evaluasi dan Akuntabilitas Kinerja
		Dona Elfira Amelia, S.STP., M.Si.	Kepala Subbagian Akuntabilitas Kinerja
13.	Pokja Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		
	Koordinator	Dr. Drs. Yakob KM., M.Si.	Kepala Pusat Data dan Informasi
	Anggota	FX. Benny Satrio Yulianto, S.H., M.Si.	Kepala Subdirektorat Pengembangan Komunikasi
		Bonavantura Salman, S.H., M.Ec.Dev.	Kepala Subdirektorat Analisis dan Sinkronisasi II
		Toto Purbiyanto, S.Kom, M.Ti.	Direktur Standardisasi Materi dan Metode Formal, Nonformal dan Informal
		Feri Devina, S.ST., M.M.	Kepala Subdirektorat Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Informal

		Andriani Johar, AKS., M.Si.	Kepala Subdirektorat Evaluasi I
		Syukri Qadri, S.H., M.H.	Kepala Subbagian Layanan Pengadaan
		Hermanu Prabowo, S.H., M.A.	Kepala Subbagian Informasi Hukum
14.	Sekretariat	Henry Yulius Wines Hutagol, S.H., M.H.	Kepala Subdirektorat Pendampingan
		Wahyu Syakhala, S.STP, M.M.	Kepala Subbagian Tata Usaha Deputy Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan
		Basuki Katono, S.H., M.Si.	Kepala Subbagian Tata Usaha Deputy Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi
		Muhammad Yanuar Hadi Susanto, S.Kom.	Kepala Subbagian Persuratan dan Tata Usaha Biro
		Franko Jhoner, S.H., M.H.	Kepala Subbagian Tata Usaha Deputy Bidang Pendidikan dan Pelatihan
		Sapta Mupakat Tatar Purba, S.Sos., M.H.	Kepala Subbagian Tata Usaha Deputy Bidang Pengendalian dan Evaluasi
		Hariyanto Siringo Ringo, S.H.	Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Hukum
		Siti Sumiarti, S.E.	Analisis Kelembagaan
15.	LO dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Dra. Hatni	Kepala Bidang Penyiapan Perumusan Kebijakan Reformasi Birokrasi
		Shokif Khoirul Anam, S. S.T.	Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan
		Astri Mefayani, S.E., M.Ak.	Kepala Subbidang Pemantauan dan Evaluasi

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 11 Februari 2020

KEPALA

BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,



YUDIAN WAHYUDI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
TAHUN 2020

URAIAN TUGAS
TIM REFORMASI BIROKRASI BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
TAHUN 2020

No.	Jabatan	Tugas
1.	Pengarah	Memberikan arahan strategis terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
2.	Penanggung Jawab	a. Bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila; dan b. Mengambil kebijakan strategis terkait pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
3.	Ketua	a. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan teknis Reformasi Birokrasi di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila; dan b. Mengkoordinasikan seluruh pokja.
4.	Wakil Ketua	Membantu Ketua dalam melakukan pelaksanaan teknis Reformasi Birokrasi di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dan mengkoordinasikan seluruh pokja.
4.	Sekretaris	Melaksanakan koordinasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

5.	Pokja Program Manajemen Perubahan	<p>a. Menyusun strategi manajemen perubahan;</p> <p>b. Menyusun strategi komunikasi;</p> <p>c. Melakukan sosialisasi manajemen perubahan;</p> <p>d. Melakukan internalisasi manajemen perubahan; dan</p> <p>e. Mengukur tingkat keberhasilan manajemen perubahan.</p>
6.	Pokja Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	<p>a. Melakukan identifikasi terhadap peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;</p> <p>b. Melakukan revisi terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/tidak sinkron;</p> <p>c. Menciptakan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>d. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan.</p>
7.	Pokja Program Penataan dan Penguatan Organisasi	<p>a. Melakukan evaluasi terhadap struktur serta tugas dan fungsi organisasi; dan</p> <p>b. Melakukan penataan dan perubahan terhadap struktur serta tugas dan fungsi organisasi.</p>
8.	Pokja Program Penataan Tata Laksana	<p>a. Melakukan Penyusunan dan Penyempurnaan Standar Operasional Prosedur;</p> <p>b. Melakukan penerapan Sistem Informasi (SI) dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK); dan</p>

		<p>c. Menerapkan <i>e-government</i> untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja.</p>
9.	Pokja Program Penataan Sistem Manajemen SDM	<p>a. Melakukan perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi;</p> <p>b. Melaksanakan penerimaan pegawai dengan proses rekrutmen yang transparan, obyektif, akuntabel dan bebas KKN;</p> <p>c. Melakukan pengembangan berbasis kompetensi terhadap pegawai;</p> <p>d. Melakukan promosi jabatan secara terbuka dan transparan;</p> <p>e. Menyusun penetapan kinerja individu;</p> <p>f. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penegakkan disiplin dan Kode Etik Pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila; dan</p> <p>g. Melaksanakan evaluasi jabatan.</p>
10.	Pokja Program Penguatan Pengawasan	<p>a. Menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);</p> <p>b. Melakukan pengendalian gratifikasi pada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;</p> <p>c. Melakukan penanganan terhadap pengaduan masyarakat atas pelayanan atau kinerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;</p> <p>d. Melaksanakan <i>whistleblowing system</i> pada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila; dan</p> <p>e. Melaksanakan penanganan benturan kepentingan pada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.</p>

11.	Pokja Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja	<p>a. Melakukan penyusunan Renstra BPIP tahun 2020 – 2024;</p> <p>b. Melakukan penyusunan Penetapan Kinerja; dan</p> <p>c. Menyusun sistem pengukuran kinerja yang berbasis elektronik.</p>
12.	Pokja Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	<p>a. Menyusun dan menyempurnakan standar pelayanan di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;</p> <p>b. Melakukan peningkatan pelayanan publik melalui pemanfaatan sistem informasi; dan</p> <p>c. Menerapkan kebijakan keterbukaan informasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
13.	Sekretariat	<p>a. Mempersiapkan kelengkapan administrasi dan kelengkapan teknis pertemuan tim Reformasi Birokrasi;</p> <p>b. Menyusun notulen rapat tim Reformasi Birokrasi;</p> <p>c. Menyusun laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi; dan</p> <p>d. Mendokumentasikan hasil rapat tim Reformasi Birokrasi.</p>

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 11 Februari 2020

KEPALA

BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,



YUDIAN WAHYUDI